

SKRIPSI

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PINJAMAN TANPA AGUNAN ANTARA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DENGAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) BATANG KAPUR DI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Oleh :

ALBERT CIANO

1810111121

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing :

Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H.

Shafira Hijriya, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Unit Pengelola Kegiatan merupakan lembaga yang bergerak di dalam bidang pemberdayaan masyarakat. UPK mengelola dana bergulir dari PNPM MPd, salah satu bentuk kegiatan yang dijalankan oleh UPK adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). kegiatan dalam hal pinjaman modal Program PNPM MPd untuk masyarakat miskin yang di pedesaan. Setelah program berakhir maka dana SPP tersebut menjadi hak masyarakat kecamatan, karena dana tersebut hibah dari pemerintah kepada masyarakat miskin di pedesaan. seiring berjalannya waktu Perjanjian simpan pinjam tanpa agunan antara kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dengan unit pengelola kegiatan (UPK) Batang Kapur masalah keperdataan yang sering terjadi pada perjanjian ini. Seperti terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman dana yang tentunya hal ini merupakan kerugian bagi UPK. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi setelah berakhirnya kredit tanpa agunan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?, dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban pinjaman SPP yang wanprestasi pada Unit Pengelola Kegiatan Batang Kapur Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota? Untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh UPK adalah menagih tunggakan, kunjungan bersama, memberi surat peringatan, memberi *re-schedule*, dan musyawarah. Kemudian pertanggungjawaban dana Simpan Pinjam Perempuan yang mengalami wanprestasi tersebut, yang dilakukan oleh kelompok SPP adalah menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat yang ada di kecamatan karena dana SPP tersebut sudah dihibahkan oleh pemerintah kepada masyarakat pedesaan yang ada di kecamatan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Kata kunci: Pinjaman Tanpa Agunan, Simpan Pinjam Perempuan, Penyelesaian.

